



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 185998

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.400.100.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 705 m2/140 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.410.000.000
2. Tanah Seluas 940 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 310.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/170 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 444.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 614.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI L200 PICKUP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI L200 PICKUP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



7. MOTOR, KAWASAKI VERSYS X 250CC SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.760.586.505
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.157.093.694
Sub Total	Rp.	5.966.780.199
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.966.780.199

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.